

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**Rancangan Akhir Rencana Kerja**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2023**



SALINAN

## BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

##### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

  
**ERI FORTUNA, SH**  
NIP.19660104199303 1 006

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja ( renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ( renja ) ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan selama lima tahun ke depan. Rencana Kerja ( renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Secara teknis Rencana Kerja ini memuat tentang Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 1 tahun, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap aparatur pengelola pendidikan dan kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Rencana Kerja ( renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk menilai kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga memiliki kemampuan bekerja secara inovatif dan profesional.

Demikianlah Rencana Kerja Rencana Kerja ( renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini disusun semoga dapat mencapai sasaran serta memberikan manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**INDRAWATI, S.Pd, M.M.Pd**  
NIP. 19621117 198207 2 002

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ...	14
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	53
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	55
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... ..	58
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	75
<b>BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 .....	78
3.3. Program dan Kegiatan .....	79

<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT</b>	
	<b>DAERAH</b>	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	101

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1.1	Kalender Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 ..... 2
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota ..... 33
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota ..... 53
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota ..... 60
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota ..... 75
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota ..... 81
Tabel 4.2	Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD ..... 99
Tabel 4.3	Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022 ..... 99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimana memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 3 dimana dokumen perangkat daerah meliputi: a) rencana strategis perangkat daerah dan b) rencana kerja perangkat daerah dan ayat 4 yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, adapun tahapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;

VI. Penetapan.

**I. Persiapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,**  
dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan seluruh anggota tim penyusunan Renja pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2021 tanggal 14 Oktober 2021 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar sesama anggota tim dalam hal tata cara dan jadwal penyusunan penyusunan renja.
2. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun kalender Penyusunan Renja. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kalender Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023**

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2021			2022																				
		Oktober	November	Desember	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli		
<b>A</b>	<b>Persiapan Penyusunan Renja 2022</b>																								
1	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																								
2	Rapat mengenai Renja Bapelitbang																								
3	Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD																								
<b>B</b>	<b>Penyusunan Rancangan Awal Renja 2023</b>																								
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2022																								
2	Penyempurnaan rancangan awal																								





Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

### **III. Penyusunan Rancangan Renja**

Penyusunan Rancangan Renja merupakan Rancangan Awal Renja yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah. Penyajian Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.

### **IV. Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah**

Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah antar pihak-pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam wujud pendekatan partisipatif perencanaan. Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 di Hotel Mangkuto dengan narasumber yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapelitbang dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **V. Perumusan Rancangan Akhir**

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## **VI. Penetapan**

Dalam hal penetapan Renja, Bapelitbang mengumpulkan Rancangan Akhir Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ketiga peridode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi visi pembangunan daerah Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan **Misi Pertama** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan bersaing berdasarkan nilai-nilai keagamaan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2021, mempedomani pada Rencana Strategis Tahun 2023, hasil evaluasi renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun tahun sebelumnya dan evaluasi hasil renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun berjalan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang merupakan penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2023 mengikuti arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 berisi kebijakan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dibiayai melalui berbagai sumber dana yaitu DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan alokasi hibah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan pada peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan agar tercapai sinergi yang optimal sehingga pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi antara lain:

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan diseluruh jenjang

Strategi yaitu:

- a. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan diseluruh jenjang mulai dari SD sampai dengan Sekolah Menengah, khususnya bagi anak kurang mampu melalui pemberian dana bantuan pendidikan; anak berkebutuhan khusus melalui penyelenggaraan sekolah inklusi; dan bagi daerah 3T melalui program afirmasi;
- b. Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan pendidikan menengah dari keluarga tidak mampu.

2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan

Strategi yaitu:

- a. Melaksanakan program sekolah penggerak di seluruh jenjang mulai dari SD sampai Sekolah Menengah sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
- b. Menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum, dan memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah dan siswa;
- c. Mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi dan karakter;

- d. Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
- e. Memfasilitasi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi membangun karier sesuai dengan bidangnya;
- f. Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrument dalam mengukur kualitas hasil belajar.
- g. Membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industry untuk memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja; menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industry; menyediakan pemagangan dan praktik kerja; mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; dan menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standard dan kebutuhan industry;
- h. Melaksanakan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi guru dan program afirmasi bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah khusus;
- i. Menyediakan sumber belajar yang relevan dan berkualitas.

Tujuan rencana kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yaitu: mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing dengan sasaran meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun indikator tujuan /sasaran yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Program unggulan gubernur yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru.
2. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal)
3. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20%.
4. Seribu siswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
5. Membangun SMA/SMK/SLB baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan dan kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi pendidikan dan kebudayaan, Forum Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan tahapan Musrenbang nagari, musrenbang RKPD Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten guna merumuskan perencanaan Tahun 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 yaitu :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.
3. Acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2023.
3. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I           Pendahuluan**

Berisikan latar belakang penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **Bab II           Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Berisikan evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Pearngkat Daerah serta program dan kegiatan.

**Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

**Bab V Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD Kabupaten tahun berjalan. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang akan timbul dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2023 memuat target kinerja Tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2021 yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

## **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

### **1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.399.506.827.043,- dan realisasi keuangan Rp.395.530.530.607,- atau 99% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.14.858.000,- atau 99,05 % serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan keuangan SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.14.827.000,- atau 98,85% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya akuntansi SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pelaksanaan akuntansi SKPD.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.14.974.000,- atau 99,83% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.9.678.000,- atau 96,78% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

- f. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.9.996.000,- atau 99,96% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan pelaporan dan analisis pronogsis realisasi anggaran dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan pelaporan dan analisis pronogsis realisasi anggaran.

## **2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.891.416.000,- dan realiasasi keuangan Rp.889.406.000,- atau 99,77% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rekonsilidasi dan penyusunan laporan barang milik daerah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan laporan barang milik daerah.

## **3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.230.885.000,- dan realisasi keuangan Rp.228.045.000,- atau 98,77% serta realisasi fisik sub kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

## **4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.911.800,- dan realiasi keuangan Rp.8.911.800,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.974.200,- dan realiasi keuangan Rp.95.909.000,- atau 99,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.034.000,- dan realiasi keuangan Rp.195.732.222,- atau 99,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

#### **5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.5.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa surat menyurat.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.152.200.000,- dan realisasi keuangan Rp.98.971.569,- atau 65,03% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.275.930,- dan realisasi keuangan Rp.129.757.720,- atau 98,10% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.026.762.750,- dan realiasi keuangan Rp.1.986.580.250,- atau 98,02% serta realisasi fisik mencapai 100%.

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

## **6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.171.400,- dan realiasi keuangan Rp.204.975.400,- atau 99,90% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.528.700,- dan realiasi keuangan Rp.28.528.700,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen RKA-SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.078.700,- dan realiasi keuangan Rp.28.078.700,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.078.700,- dan realiasi keuangan Rp.24.810.500,- atau 88,36% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen DPA-SKPD.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.078.700,- dan realiasi keuangan Rp.28.078.700,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan

DPA-SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD.

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.081.000,- dan realiasi keuangan Rp.182.539.000,- atau 97,05% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.840.800,- dan realiasi keuangan Rp.39.629.800,- atau 99,47% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

## **7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.256.000,- dan realisasi keuangan Rp.134.480.000,- atau 83,92% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.725.000,- dan realisasi keuangan Rp.67.140.000,- atau 99,14% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

## **II. Program Pengelolaan Pendidikan**

### **1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

- a. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp.793.116.500,- dan realiasi keuangan Rp.491.690.328,- atau 61,99% serta realisasi fisik mencapai 55,96%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penambahan Ruang Kelas Baru.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.425.600.00,- dan realiasi keuangan Rp.1.421.573.901,- atau 99,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.395.690.050,- dan realiasi keuangan Rp.2.381.466.276,- atau 99,41% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.876.474.000,- dan realiasi keuangan Rp.1.871.218.960,- atau 99,72% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Perpustakaan Sekolah.
- e. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.709.157.250,- dan realiasi keuangan Rp.3.674.052.922,- atau 99,05% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
- f. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.044.110.500,- dan realiasi keuangan Rp.1.040.572.750,- atau 99,66% serta realisasi fisik mencapai 100%.

- Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.
- g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.733.137.700,- dan realiasi keuangan Rp.730.955.600,- atau 99,70% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
  - h. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.256.940.000,- dan realiasi keuangan Rp.254.532.600,- atau 99,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Mebel Sekolah.
  - i. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.940.000,- dan realiasi keuangan Rp.151.502.009,- atau 98,42% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan.
  - j. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.060.150.000,- dan realiasi keuangan Rp.878.748.000,- atau 82,89% serta realisasi fisik mencapai 97,65%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
  - k. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.191.733.400,- dan realiasi keuangan Rp.190.323.000,- atau 99,26% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik penyelenggaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik.

- I. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.30.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar.
- m. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.132.352.420,- dan realiasi keuangan Rp.128.324.300,- atau 96,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- n. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.378.727.000,- dan realiasi keuangan Rp.355.478.200,- atau 93,86% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- o. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.651.700,- dan realiasi keuangan Rp.66.033.700,- atau 99,07% serta realisasi fisik mencapai 80%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.
- p. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.390.147.899,- dan realiasi keuangan Rp.40.449.126.681,- atau 93,22% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOS

Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

- q. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.245.000,- dan realiasi keuangan Rp.33.245.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

## **2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.290.000,- dan realisasi keuangan Rp.169.361.600,- atau 99,45% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.753.012.400,- dan realiasi keuangan Rp.750.428.100,- atau 99,66% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Fasilitas Parkir dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Fasilitas Parkir.
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.727.593.100,- dan realiasi keuangan Rp.633.946.877,- atau 87,13% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas.
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.291.461.000,- dan realiasi keuangan Rp.252.638.881,- atau 86,68% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah.

- e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dengan alokasi anggaran sebesar Rp.663.646.000,- dan realiasi keuangan Rp.574.586.167,- atau 86,58% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium.
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.421.495.000,- dan realiasi keuangan Rp.406.392.000,- atau 96,42% serta realisasi fisik mencapai 98,58%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.933.700,- dan realiasi keuangan Rp.99.814.900,- atau 98,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik.
- h. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.200,- dan realiasi keuangan Rp.20.000.200,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama.
- i. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.068.300,- dan realiasi keuangan Rp.154.245.000,- atau 97,58% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.273.000,- dan realiasi keuangan Rp.73.540.800,- atau 90,49% serta

- realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- k. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.177.000,- dan realiasi keuangan Rp.71.983.000,- atau 95,75% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - l. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.612.738.750,- dan realiasi keuangan Rp.16.537.885.252,- atau 88,85% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
  - m. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.45.462.500,- atau 90,93% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

### **3. Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini (PAUD)**

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.535.699.900,- dan realiasi keuangan Rp.533.990.496,- atau 99,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD.

- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.511.405.700,- dan realiasi keuangan Rp.506.580.316,- atau 99,06% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.49.881.358,- atau 99,76% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan rutin Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pemeliharaan rutin Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD.
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.429.635.000,- dan realiasi keuangan Rp.423.232.700,- atau 98,51% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga PAUD.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.698.200,- dan realiasi keuangan Rp.7.624.700,- atau 15,04% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.
- f. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.035.400,- dan realisasi keuangan Rp.1.775.400,- atau 29,42% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya penyelenggaraan proses belajar PAUD.
- g. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.894.700,- dan realisasi keuangan Rp.10.829.700,- atau 21,71% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran

dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD.

- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.713.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.4.475.700.000,- atau 94,96% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Karir Dana BOP PAUD dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOP PAUD.

#### **4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan**

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.634.000,- dan realiasi keuangan Rp.210.182.967,- atau 96,13% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.251.100,- dan realiasi keuangan Rp.99.167.120,- atau 90,77% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan.
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.166.141.800,- dan realiasi keuangan Rp.158.986.900,- atau 95,69% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan.
- d. Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.074.900,- dan realiasi keuangan Rp.7.805.000,- atau 59,69% serta

- realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
- e. Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.145.000,- dan realiasi keuangan Rp.11.645.000,- atau 76,89% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
- f. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.965.000,- dan realisasi keuangan Rp.22.805.000,- atau 87,835 serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan.
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.145.000.000,- dan realiasi keuangan Rp.2.145.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan.

### **III. Program Pengembangan Budaya**

#### **1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Perlindungan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.338.700,- dan realisasi keuangan Rp.22.323.600,- atau 99,64% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya

Perlindungan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja meningkatnya Perlindungan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.268.057.400,- dan realisasi keuangan Rp.267.026.600,- atau 99,62% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan.

## **2. Kegiatan Pelestarian Keseniaan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.55.410.000,- dan realisasi keuangan Rp.35.887.000,- atau 64,77% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan capaian kinerja meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.175.400,- dan realisasi keuangan Rp.35.294.100,- atau 76,43% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional.

## **3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.894.000,- dan realisasi keuangan Rp.28.526.700,- atau 98,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan

Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat dengan capaian kinerja meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.173.141.000,- atau 97,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat dengan capaian kinerja meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga adat.

#### **IV. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional**

##### **1. Kegiatan Pembinaan Keseniaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.412.986.000,- dan realisasi keuangan Rp.406.716.600,- atau 98,48% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional ini adalah terlaksananya dengan capaian kinerja meningkatnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Keseniaan Tradisional.

#### **V. Program Pembinaan Sejarah**

##### **1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.999.900,- dan realisasi keuangan Rp.84.999.900,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja meningkatnya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota.

## **VI. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

### **1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.113.900,- dan realisasi keuangan Rp.5.113.900,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dengan capaian kinerja Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya.
- b. Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.983.200,- dan realisasi keuangan Rp.43.136.600,- atau 89,90% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penetapan Cagar Budaya dengan capaian kinerja Penetapan Cagar Budaya.

### **2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.656.900,- dan realisasi keuangan Rp.3.656.900,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Perlindungan Cagar Budaya dengan capaian kinerja Perlindungan Cagar Budaya.
- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.220.600,- dan realisasi keuangan Rp.60.838.900,- atau 99,38% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya dengan capaian kinerja Pemanfaatan Cagar Budaya.

## **VII. Program Pengelolaan Permuseuman**

### **1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.972.600,- dan realisasi keuangan Rp.12.687.600,- atau 90,80% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman dengan capaian kinerja Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman.

Realisasi program/kegiatan yang memenuhi/tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1											
1		<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar</b>									
1	01	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>									
1	01	01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>60</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>
1	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>						

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)																	
						Target Renja OPD tahun 2021(n-2)		Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)															
<b>1</b>					<b>2</b>					<b>3</b>					4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>10</b>	dok			2	dok	2	dok	<b>100</b>			2	dok	2	dok	<b>100</b>			2	dok	2	dok	<b>100</b>	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	<b>5</b>	dok			1	dok	1	dok	<b>100</b>			1	dok	1	dok	<b>100</b>			1	dok	1	dok	<b>100</b>	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	<b>5</b>	dok			1	dok	1	dok	<b>100</b>			1	dok	1	dok	<b>100</b>			1	dok	1	dok	<b>100</b>	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	<b>10</b>	dok			2	dok	2	dok	<b>100</b>			2	dok	2	dok	<b>100</b>			2	dok	2	dok	<b>100</b>	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	<b>5</b>	dok			1	dok	1	dok	<b>100</b>			1	dok	1	dok	<b>100</b>			1	dok	1	dok	<b>100</b>	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>19</b>	dok			8	dok	8	dok	<b>100</b>			8	dok	8	dok	<b>100</b>			8	dok	8	dok	<b>100</b>	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)											
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>Administarsi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>															
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	dok												
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>Administarsi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>															
1	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan														
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								10	orang	10	orang	100		
1	01	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Nimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110	orang		22	org	22	org	100		22	orang	22	orang	100
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administarsi umum perangkat daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah</b>															
1	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	60	bulan		12	bulan	12	bulan	100		12	bulan	12	bulan	100
1	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang		bulan								12	bulan	12	bulan	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)			
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
		Disediakan													
1	01 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	12	bulan	100
1	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	12	bulan	100
<b>1</b>	<b>01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>												
1	01 01 2.07	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan												
1	01 01 2.07	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan												
<b>1</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>												
1	01 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	12	bulan	100
1	01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya manusia air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	12	bulan	100



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)											
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
1	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan pendidikan sekolah dasar</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar</b>													
1	01	02	2.01	02	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	<b>64</b>	paket		5	paket	5	paket	<b>100</b>						
1	01	02	2.01	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	<b>35</b>	ruang		7	ruang	7	ruang	<b>100</b>	7	ruang	7	ruang	<b>100</b>	
1	01	02	2.01	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangu	<b>155</b>	ruang		31	ruang	31	ruang	<b>100</b>	31	ruang	31	ruang	<b>100</b>	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	<b>45</b>	ruang		9	ruang	9	ruang	<b>100</b>						
1	01	02	2.01	06	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	<b>60</b>	paket		12	paket	12	paket	<b>100</b>	12	paket	12	paket	<b>100</b>	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun		paket												
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	<b>70</b>	paket		14	paket	14	paket	<b>100</b>	14	paket	14	paket	<b>100</b>	
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	<b>5</b>	ruang							1	ruang	1	ruang	<b>100</b>	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	<b>40</b>	paket												
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	<b>30</b>	paket		6	paket	6	paket	<b>100</b>	6	paket	6	paket	<b>100</b>	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)									
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)		Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)											
		Rekomendasi																			
1	01	02	2.01	25	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	20	keg			4	keg	4	keg	100		4	keg	4	keg	100
1	01	02	2.01	26	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10	keg			2	keg	2	keg	100		2	keg	2	keg	100
1	01	02	2.01	27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10	keg			2	keg	2	keg	100		2	keg	2	keg	100
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1830	SD			366	SD	366	SD	100		366	SD	366	SD	100
1	01	02	2.01	30	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Tenaga Pengelolaan yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5	keg			1	keg	1	keg	100		1	keg	1	keg	100
1	01	02	2.02	02	Penambahan ruang kelas sekolah baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	54										15	ruang	15	ruang	100
1	01	02	2.02	03	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah	21														



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)						
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
		Sedang/Berat													
1	01 02 2.02 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0											
1	01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0											
1	01 02 2.02 25	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	63											
1	01 02 2.02 26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0											
1	01 02 2.02 27	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3											
1	01 02 2.02 28	Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	3											
1	01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13000	siswa			4.000	buku	4.000	buku	100			
1	01 02 2.02 33	Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	171											
1	01 02 2.02 35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	15	paket	6	paket	6	paket	100	6	paket	6	paket	100
1	01 02 2.02 36	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	5	keg	1	keg	1	keg	100					

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)								
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)		Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5	keg			1	keg	1	keg	100					
1	01	02	2.02	38	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	20	keg			4	keg	4	keg	100	4	keg	4	keg	100
1	01	02	2.02	39	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8	keg			1	keg	1	keg	100	1	keg	1	keg	100
1	01	02	2.02	40	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	8	keg			1	keg	1	keg	100	1	keg	1	keg	100
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	1212	SMP			57	SMP	57	SMP	100	57	SMP	57	SMP	100
1	01	02	2.02	43	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5	keg			1	keg	1	keg	100	1	keg	1	keg	100
1	01	02	2.03	01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	15	ruang			3	ruang	3	ruang	100	3	ruang	3	ruang	100
<b>1</b>		<b>01</b>		<b>02</b>		<b>2.03</b>		<b>01</b>		<b>Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini</b>								





Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)								
			Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)								
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11260	WB			2252	WB	2252	WB	100						
1	01	02	2.04	14	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5	keg							1	keg	1	keg	100		
1	01	02	2.04	15	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	105	lembaga			21	lembaga	21	lembaga	100		21	lembaga	21	lembaga	100
1	01	02	2.04	16	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	105	lembaga			21	lembaga	21	lembaga	100						
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11260	WB			2252	WB	2252	WB	100		2252	WB	2252	WB	100
1	01	04			<b>Program pendidikan dan tenaga kependidikan</b>	<b>Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan</b>	100				75		75		100		75		75		100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)								
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)		Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
1	01	04	2.01	1	<b>Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan</b>													
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	5	keg	1	keg	1	keg	100							
1	01	04	2.01	02	Penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	5	keg	1	keg	1	keg	100	1	keg	1	keg	100		
2					<b>Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar</b>															
2	22				<b>Urusan pemerintahan bidang kebudayaan</b>															
2	22	02			<b>Program pengembangan kebudayaan</b>	<b>Persentase pengembangan kebudayaan</b>	86													

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)								
					Target Renja OPD tahun 2021(n-2)	Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)										
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>1</b>	<b>Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota</b>													
2	22	02	2.01	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5	keg												
2	22	02	2.01	02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	5	keg					1	keg	1	keg			100	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>2</b>	<b>Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</b>													
2	22	02	2.02	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5	keg		1	keg	100								
2	22	02	2.02	02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5	keg		1	keg	100		1	keg	1	keg		100	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>02</b>	<b>2.0</b>	<b>3</b>	<b>Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota</b>													



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 (Tahun lalu/n-2)						Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)					
						Target Renja OPD tahun 2021(n-2)		Realisasi Renja OPD Tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)				
2	22	04				<b>Program pembinaan sejarah</b>		<b>Persentase pembinaan sejarah</b>		90			45	45	<b>100</b>			
2	22	04	2.0	1		<b>Pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota</b>										
2	22	04	2.01	01		Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten / kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	<b>5</b>	keg		1	keg	1	keg	<b>100</b>			
2	22	04	2.01	02		Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	<b>5</b>	keg									
2	22	04	2.01	03		Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	<b>5</b>	keg									
2	22	05				<b>Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya</b>		<b>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</b>		90			45	45	<b>100</b>			
2	22	05	2.0	1		<b>Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota</b>										
2	22	05	2.01	01		Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	<b>5</b>	keg		1	keg	1	keg	<b>100</b>			
2	22	05	2.01	02		Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		keg		1	keg	1	keg	<b>100</b>			
2	22	05	2.0	2		<b>Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota</b>										
2	22	05	2.02	01		Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	<b>5</b>	keg		1	keg	1	keg	<b>100</b>			



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Analisa kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Pencapaian kinerja ini berpedoman pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2026. Untuk lebih jelasnya analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat lihat pada Tabel T-C.30.

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKD	Target Renstra OPD (Tahun)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)
1	Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)			283	287	295	301	279	281	295	301	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
2	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD			51,19	51,69	52,19	52,69	32,35	32,59	52,19	52,69	
3	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A			108,04	108,92	109,80	110,68	98,77	98,79	109,80	110,68	
4	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/PakeB			85,91	87,54	89,17	90,8	112,74	112,82	89,17	90,8	
	Angka Partisipasi Murni (APM)											
5	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A			99,29	99,46	99,63	99,80	88,71	88,73	99,63	99,80	
6	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B			81,68	83,11	84,54	85,97	85,82	85,82	84,54	85,97	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)											
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A			99,21	99,30	99,39	99,48	92,16	92,16	99,39	99,48	
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			97,04	97,25	97,46	97,67	68,34	68,34	97,46	97,67	
	Angka Putus Sekolah											
11	Angka putus sekolah SD/MI			0,002	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,001	0,001	
12	Angka putus sekolah SMP/MTs			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	Angka Kelulusan											
13	Angka kelulusan (AL) SD/MI			100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Melanjutkan (AM)											
15	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Fasilitas Pendidikan											
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			1006	1256	1506	1756	850	756	1506	1756	
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			407	432	457	482	450	450	457	482	
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar			88,85	88,95	88,95	89	89,15	89,15	88,95	89	
19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah			25,89	25,89	25,90	25,90	26,03	26,03	25,90	25,90	
20	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar			10,70	10,75	10,80	10,86	10,96	10,96	10,80	10,86	
21	Rasio guru / murid sekolah pendidikan menengah			8,72	8,75	8,77	8,80	8,93	8,93	8,77	8,80	
22	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah dasar			0,45	0,46	0,47	0,48	0,60	0,60	0,47	0,48	
23	Rasio guru / murid per kelas rata-rata			1,76	1,79	1,80	1,81	1,92	1,92	1,80	1,81	
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	V		43,25	43,75	44,25	44,75	53,14	53,14	44,25	44,75	
25	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	V		87,66	88,41	89,16	89,91	89,96	89,96	89,16	89,91	

	berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar										
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	V	46,02	46,12	46,22	46,32	46,18	46,18	46,22	46,32	
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	V	2,75	2,80	2,85	2,90	2,65	2,65	2,85	2,90	
	Kebudayaan										
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		2	4	4	5	1	2	4	5	
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		95	105	105	110	110	110	105	110	
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		68	68	70	70	70	70	70	70	
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		14	14	20	20		20	20	20	
	Terlestarikan cagar budaya		70	75	80	85	65	65	80	85	

Dari tabel diatas, dapat dilihat :

1. Jumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun 2021 yaitu 279 lembaga dan pada tahun 2022 terjadinya penambahan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 2 lembaga.
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dengan penduduk usia sekolah yang dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2021 yaitu 32,35. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ini belum tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dengan penduduk usia sekolah yang dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2021 dengan target yaitu 108,04 dengan realisasi pencapaian yaitu 98,77. Tidak tercapai Angka Partisipasi ini disebabkan masih ada anak yang sekolah diluar Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dengan penduduk pada usia sekolah yang dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket A tahun 2021 dengan target yaitu 85,91 dengan realisasi capaian yaitu 112,74.
5. Angka putus sekolah SD/MI target 2021 yaitu 0,001 artinya dalam seribu anak terdapat 1 anak putus sekolah, sementara realisasinya 0,01 artinya didalam 100 anak terdapat 1 orang anak putus sekolah.

### Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realiasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Meningkatkan Kualitas Pengembangan Kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	-	2,53	46,83	77,21	-	-0	46,83	77,21	Belum terlaksana
2	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	13,48	13,76	13,85	14,13	13,29	13,30	13,85	14,13	
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan	Nilai AKIP	B	B	B	B	B	B	B	B	
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	47,92	53,33	58,75	64,17		C	58,75	64,17	

	Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,98	87,98	89,97	91,97		75	89,97	91,97	
--	---	--	-------	-------	-------	-------	--	----	-------	-------	--

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:

1. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku ini belum tercapai disebabkan indikator ini baru dihitung pada tahun 2022.
2. Angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2021 angka harapan lama sekolah sebesar 13,30 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun keatas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun. Angka harapan lama sekolah untuk tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 13,48.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah untuk Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**

Adapun misi pembangunan daerah sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sectoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dari lima (5) misi tersebut di atas yang terkait dengan pembangunan daerah terhadap pelayanan dasar Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi ke tiga (1) yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dengan sasaran yaitu optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya

Maka dalam rangka mewujudkan misi ke satu (1) program-program pendidikan dan kebudayaan mengacu yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A. Tantangan

1. Belum tercapainya wajib belajar 9 tahun
2. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan
3. Kesenjangan distribusi tenaga pendidik masih tinggi
4. Masih rendahnya profesional tenaga pendidik
5. Masih rendahnya pemanfaatan informasi teknologi dalam dunia pendidikan
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung

pencapaian peningkatan mutu pendidikan terutama pada lokasi pinggiran.

7. Belum optimalnya jangkauan pendidikan dari PAUD/TK.
8. Belum optimalnya pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah.
9. Masih minimnya alokasi anggaran pendidikan.

## B. Peluang

1. Pemerataan bantuan operasional sekolah.
2. Pemberian Kartu Indonesia Pintar.
3. Penyaluran beasiswa transisi bagi siswa di daerah 3 T yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama.
4. Pemerataan terhadap pendidik.
5. Pelatihan berbasis teknologi informasi.
6. Pemberian bantuan rehab sarana dan prasarana sekolah.
7. Evaluasi mutasi pendidik.
8. Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana alokasi anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD.

Berdasarkan faktor pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ujung tombak dalam penentuan keberhasilan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan harapan dan cita-cita pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dan pengembangan nilai seni dan budaya daerah.

Adapun isu strategis yaitu:

- a. Jaminan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah. Penyediaan dana peningkatan kualifikasi pendidik mencapai standar kualifikasi D4/S1 untuk semua jenjang pendidikan.
- b. Jaminan keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan.
- c. Jaminan untuk masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan status social dan ekonomi masyarakat.

- d. Menerapkan standar nasional pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa dan olah raga.
- e. Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.
- f. Belum terpenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- g. Belum terdatanya potensi-potensi seni, sejarah dan budaya daerah yang menjadi akurasi yang tepat.
- h. Belum aktifnya lembaga kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 disusun dengan mempedomani hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rencana kerja yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pengembangan kesenian Tradisional
6. Program Pembinaan Sejarah

Analisa Kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pendidikan disusun dengan memperhatikan usulan-usulan dari stakeholder dan lintas Perangkat Daerah dan mengakomodir Pokok-pokok Pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Hasil Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang ditetapkan pada proses ini sama dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan Awal RKPD. Hanya terdapat perbedaan pada target dan jumlah anggaran yang dibutuhkan, dimana jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari Rancangan Awal RKPD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.31

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		<b>404,085,125,723</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		<b>530,568,254,319</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		<b>545,858,000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		<b>358,739,100</b>	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	205,171,400	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	158,710,400	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	28,528,700	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	15,285,400	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	28,078,700	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	15,285,400	
	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	28,078,700	Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	15,285,400	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	28,078,700	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	15,285,400	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	188,081,000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	119,712,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	39,840,800	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	19,175,100	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>399,571,827,043</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah</b>		<b>526,650,102,219</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4500 ob	399,506,827,043	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4500 ob	526,477,671,019	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	15,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	20,160,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	63,532,250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	57,038,950	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 laporan	15,850,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 laporan	10,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 laporan	15,850,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>		<b>891,416,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>1,055,880,000</b>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	891,416,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1,055,880,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>230,885,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>185,600,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pendagaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pendagaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	80 orang	230,885,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	80 orang	185,600,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>300,920,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>295,633,000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	8,911,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	12,950,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	95,974,200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	111,855,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207 laporan	196,034,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207 laporan	170,828,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>-</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel			Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bandunan			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bandunan			
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>2,316,238,680</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>1,707,470,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	9,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	152,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	179,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	132,275,930	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	90,470,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	2,026,762,750	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	1,429,000,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>227,981,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>314,830,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas dan Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 unit	160,256,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas dan Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 unit	217,140,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		67,725,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		97,690,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>Persentase pengelolaan pendidikan</b>	90	<b>88,682,502,569</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>Persentase pengelolaan pendidikan</b>	90	<b>119,597,906,440</b>	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar</b>		<b>57,517,233,419</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar</b>		<b>70,538,380,300</b>	
	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 ruang	793,116,500	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 ruang	1,494,931,200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 ruang	1,425,600,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7 ruang	1,744,086,400	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15 ruang	2,395,690,050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15 ruang	1,367,889,600	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7 ruang	1,876,474,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	7 ruang	1,664,722,080	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 unit	3,709,157,250	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 unit	5,458,231,100	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	604,800,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 ruang	1,044,110,500	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 ruang	1,719,299,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	560,000,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	448,000,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 unit	733,137,700	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 unit	706,500,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 unit	392,000,000	
	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	500 paket	256,940,000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	500 paket	412,500,000	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
1.	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang		Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Penyediaan Biaya Persol Peserta Didik Sekolah Dasar			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Penyediaan Biaya Persol Peserta Didik Sekolah Dasar	0	1,916,535,000	
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	20 komponen	1,060,150,000	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 paket	9,250,000,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		191,733,400	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		-	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		30,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		-	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	132,352,420	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	424,458,320	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	179 orang	378,727,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	179 orang	907,000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	560 orang	66,651,700	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	560 orang	142,780,600	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	370 satuan pendidikan	43,390,147,899	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	370 satuan pendidikan	42,230,740,000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Peningkatan Kapasitasnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		33,245,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Peningkatan Kapasitasnya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		-	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama</b>		<b>22,125,688,450</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama</b>		<b>35,150,490,740</b>	
	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 ruang		Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 ruang	1,463,972,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 ruang		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 ruang	3,018,639,900	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	170,290,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	837,846,240	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang		Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 ruang	1,745,980,320	
	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 ruang		Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 ruang	2,800,844,080	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 ruang		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	3 ruang	1,008,000,000	
	Pembangunan Fasilitas Parkir				753,012,400	Pembangunan Fasilitas Parkir					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 paket		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 paket	1,779,058,400	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 ruang	727,593,100	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 ruang	1,120,000,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	291,461,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 ruang	616,000,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		663,646,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 ruang	672,000,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 unit	739,200,000	
	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah			Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Peng"Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 paket	825,000,000	
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa			Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Penyediaan Biaya Peserta didik Sekolah Menengah Pertama			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Penyediaan Biaya Peserta didik Sekolah Menengah Pertama			
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik			Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		421,495,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 paket	795,400,500	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		100,933,700	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		-	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		20,000,200	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		158,068,300	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		436,100,200	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		81,273,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		75,177,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi		99,569,100	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		18,612,738,750	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	58 satuan pendidikan	17,192,880,000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		50,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		-	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>Jumlah pengelolaan pendidikan anak usia dini</b>		<b>6,346,368,900</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>Persentase pengelolaan pendidikan</b>		<b>7,425,542,500</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		535,699,900	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 paket	424,805,000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD		511,405,700	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 paket	286,610,500	
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Guru PAUD		50,000,000	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Guru PAUD		-	
	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Pengadaan Mebel PAUD			Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		202,277,500	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		429,635,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4 paket	236,975,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		50,698,200	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5650 peserta didik	353,274,000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		390,330,500	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		6,035,400	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	90 orang	84,286,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		49,894,700	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	150 satuan pendidikan	42,778,000	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Pengelolaan Dana PAUD BOP		4,713,000,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		5,400,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	279 orang	4,206,000	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Jumlah pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan</b>		<b>2,693,211,800</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan</b>		<b>6,143,934,500</b>	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		218,634,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		-	
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan		109,251,100	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2977 peserta didik	286,022,500	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		166,141,800	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3405 peserta didik	232,127,000	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		13,074,900	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	27 satuan pendidikan	39,039,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		15,145,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	108 orang	25,073,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang		25,965,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27 satuan pendidikan	60,873,000	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pengelolaan Dana BOP		2,145,000,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	27 satuan pendidikan	5,500,800,000	
			Sekolah Non Formal/Kesetaraan					Sekolah Non Formal/Kesetaraan			
	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		0	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		<b>339,558,400</b>	
	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Jumlah Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan</b>		0	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>		<b>339,558,400</b>	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan			
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 laporan	339,558,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Kebudayaan				1,225,808,600	Urusan Kebudayaan				2,683,452,000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		Persentase Pengembagnan Kebudayaan		595,875,500	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		Persentase pengembangan kebudayaan		1,571,234,000	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota		290,396,100	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		366,961,000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		22,338,700	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	11 objek	75,899,000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		268,057,400	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang di bina	4 kegiatan	291,062,000	
	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>101,585,400</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</b>		<b>991,756,000</b>	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		55,410,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 objek	495,000,000	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		46,175,400	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 laporan	496,756,000	
	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota</b>		<b>203,894,000</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga, adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota</b>		<b>212,517,000</b>	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek		Jumlah Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2 kegiatan	201,452,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemajuan Lembaga Adat		Lembaga Adat								
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		26,894,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Adat		177,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 unit	11,065,000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>		<b>Persentase pengembangan kesenian tradisional</b>		<b>412,986,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>		<b>Persentase pengembangan kesenian tradisional</b>		<b>212,810,000</b>	
	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>412,986,000</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pemenuhan komponen pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		<b>212,810,000</b>	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Jumlah Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		412,986,000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 lembaga	212,810,000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>Persentase pembinaan sejarah</b>		<b>84,999,900</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>Persentase pembinaan sejarah</b>		<b>134,186,000</b>	
	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah kabupaten / kota</b>		<b>84,999,900</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah kabupaten/kota</b>		<b>134,186,000</b>	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		84,999,900	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1 kegiatan	134,186,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sejarah			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Sejarah			
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			
	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		<b>Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>		<b>117,974,600</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		<b>Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>		<b>481,510,000</b>	
	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota</b>		<b>53,097,100</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/ikota</b>		<b>364,460,000</b>	
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		5,113,900	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 kegiatan	58,000,000	
	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Penetapan Cagar Budaya		47,983,200	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 objek	306,460,000	
	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota</b>		<b>64,877,500</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota</b>		<b>117,050,000</b>	
	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Pelindungan Cagar Budaya		3,656,900	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 kegiatan	30,000,000	
	Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Pengembangan Cagar Budaya			Pengembangan Cagar Budaya		Jumlah Pengembangan Cagar Budaya			
	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Pemanfaatan Cagar Budaya		61,220,600	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 kegiatan	87,050,000	
	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>		<b>Persentase pengelolaan permuseuman</b>		<b>13,972,600</b>	<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>		<b>Persentase pengelolaan permuseuman</b>		<b>283,712,000</b>	
	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pengelolaan museum kabupaten/kota</b>		<b>13,972,600</b>	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum		<b>283,712,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Peningkatan Mutun dan Kapasitas Sumber Daya Permuseuman		Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutun dan Kapasitas Sumber Daya Permuseuman		13,972,600	Pembinaan dan Peningkatan Mutun dan Kapasitas Sumber Daya Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 kegiatan	283,712,000	
					<b>493,993,436,892</b>					<b>652,849,612,759</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya juga memperhatikan usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat dan stakeholder terkait lainnya. Untuk menghimpun hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan Forum Lintas OPD, mengikuti Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakat lah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk Tahun 2023 yang akan diakomodir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Kepala Daerah yang tertuang dalam kamus usulan pada SIPD.

Terdapat lebih kurang 336 usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD dan 95 usulan dari hasil musrenbang yang diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Namun usulan tersebut belum dapat diakomodir dalam Rencana Kerja Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan karena keterbatasan pagu indikatif yang telah ditetapkan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		N H L			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional terkait bidang pendidikan dan kebudayaan dikelompokkan menjadi dalam agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut : meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional, serta tujuan dan sasaran kementerian adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. semua anak usia sekolah dan prasekolah mendapatkan layanan pendidikan; dan
  - b. lulusan pendidikan tinggi meningkat.

2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut :
  - a. pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewarganegaraan global
  - b. sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas
  - c. lulusan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
  - d. lembaga pendidikan memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional; dan
  - e. sumber belajar yang relevan dan berkualitas.
3. Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Kondisi yang ingin dicapai dalam memajukan dan melestarikan bahasa dan kebudayaan adalah sebagai berikut :
  - a. pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan
  - b. penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional
  - c. meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan

Arah pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah agar dapat memprioritaskan :

1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik.
2. Peningkatan mutu lembaga Pendidikan dan Kebudayaan tenaga kependidikan dan Kebudayaan dan lulusannya.
3. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawa sekolah.
4. Penerapan metodologi Pendidikan dan Kebudayaan akhlak mulia dan karakter bangsa.
5. Pengembangan metodologi Pendidikan dan Kebudayaan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha.
6. Keterpaduan sistem evaluasi Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Penyediaan buku teks.
9. Penguatan dan perluasan Pendidikan dan Kebudayaan non formal dan informal.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Lima Tahun kedepan (2021-2026) menjalankan misi 1 (satu) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan. Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh :
  - a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah disebabkan oleh :
    - Rendahnya akses dan pengelolaan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
    - Belum tertanganinya rata-rata lama sekolah usia 22 tahun keatas dari dana DAK.
    - Belum optimalnya pendataan rata-rata lama sekolah
    - Kurangnya minat penduduk menyelesaikan pendidikan dasar pada usia diatas usia rata-rata sekolah.
  - b. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah disebabkan oleh:
    - Masih belum tertanganinya biaya penunjang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan / Nonformal
  - c. Masih rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh:
    - Belum semua guru memiliki sertifikat guru.
    - Belum terpenuhi syarat pengangkatan Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2. Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya disebabkan:
  - belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.
  - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz.
  - Belum terkelolanya cagar budaya yang ada dikabupaten Lima Puluh Kota.

Dari permasalahan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Tujuan :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

B. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan
2. Meningkatnya pengelolaan pendidikan
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Tahun 2023 dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu:

1. Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap misi 1 (satu) yaitu 'Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya' dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan.
2. Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Daerah. Pelayanan dasar pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota yaitu:

- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan uraian di atas maka Program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permuseuman

Sehingga pada Rencana Kerja Tahun 2023 ini terdapat 7 program dengan jumlah kegiatan 19 dan jumlah sub kegiatan 92.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan program dan kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan untuk Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4. 1  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Lima Puluh Kota

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Iasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Iasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>URUPANPEMERINTAHANBIDANGPENDIDIKAN</b>										<b>493,046,968,492</b>		<b>116,179,099,979</b>			
<b>1</b>	<b>01 01</b>	<b>PROGRAMPJUNJANGURUPANPEMERINTAHANDAEIAHKATUPAKEN/KOTA</b>										<b>394,300,594,117</b>		<b>4,327,875,789</b>			
<b>1</b>	<b>01 01 01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										<b>156,617,800</b>		<b>378,741,970</b>			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	4 Dokumen	7 laporan dan dokumen	55,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	158,710,400
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	1 Dokumen	7 laporan dan dokumen	15,285,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	16,813,940
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	2 Dokumen	7 laporan dan dokumen	15,285,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	16,813,940
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	22 Laporan	7 laporan dan dokumen	56,756,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	131,683,200
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	2 Laporan	7 laporan dan dokumen	13,441,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	21,092,610
<b>1</b>	<b>01 01 01</b>	<b>inistrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										<b>392,841,680,017</b>		<b>132,628,319</b>			
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	4500 Orang/	bu4l5a0n0 orang	392,805,670,017	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	0
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	1 Dokumen	4500 orang	20,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	1 Dokumen	4500 orang	15,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	0
<b>1 01 01 2.03</b>	<b>inistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>48,620,000</b>					<b>1,055,880,000</b>
1 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas 90 persentas	2 Laporan	1 laporan	48,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	85 persentase 90 persentase	1,055,880,000
<b>1 01 01 2.05</b>	<b>inistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>102,000,000</b>					<b>204,875,000</b>
1 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	80 Orang	80 orang	102,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	204,875,000
<b>1 01 01 2.06</b>	<b>inistrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>472,219,400</b>					<b>461,761,500</b>
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	60 Paket	4 paket	12,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	11,000,000
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah administrasi umum perangkat daerah		85 persentas	1 Paket	4 paket	202,500,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	145,000,000
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	7 Paket	4 paket	104,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	112,711,500
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	207 Laporan	4 paket	152,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	193,050,000
<b>1 01 01 2.08</b>	<b>ediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>436,000,000</b>					<b>1,759,649,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Eokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	4 Laporan	2 laporan	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	9,944,000
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	e4 Laporan	2 laporan	179,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	179,400,000
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	e8 Laporan	2 laporan	248,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	1,479,835,000
<b>1 01 01 2.09</b>	<b>eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>243,456,900</b>					<b>334,340,000</b>
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	48 Unit	20 unit	145,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	217,140,000
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persentas	e100 Unit	20 unit	82,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	97,200,000
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		85 persentas	e1 Unit	20 unit	15,096,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	85 persentase	20,000,000
<b>1 01 02</b>	<b>RROGRAMPEOGELNNUUKNPENDIDIKAN</b>								<b>98,746,374,375</b>					<b>111,536,441,990</b>
<b>1 01 02 2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>								<b>59,151,309,000</b>					<b>73,808,168,880</b>
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	7 Ruang	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,557,356,700
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	7 Ruang	370 satuan pendidikan	747,465,600	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,744,086,400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e15 Ruang	370 satuan pendidikan	820,733,760	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,367,889,600
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e7 Ruang	370 satuan pendidikan	475,634,880	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,664,722,080
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e30 unit	370 satuan pendidikan	3,073,781,760	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	5,452,778,100
1 01 02 2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e3 unit	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	604,800,000
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e15 Ruang	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,710,106,000
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e5 Ruang	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	560,000,000
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e5 Ruang	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	448,000,000
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e10 unit	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	706,500,000

1 01 02 2.01 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua	90 persentas	e5 unit	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	392,000,000
-----------------	---	-----------------------------------	---	---	-----------------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------	-------------------------	--	-----------------------------------	---------------	-------------

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Sekolah		Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat		Kecamatan, Semua Kelurahan						Alokasi Umum			
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e 500 paket	370 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	412,500,000
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	2380 Unit	370 satuan pendidikan	523,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	2,380,000,000
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	370 Peserta Didik	370 satuan pendidikan	3,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	440,000,000
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e 3 Paket	370 satuan pendidikan	9,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	9,280,503,500
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	370 Satuan * Pendidikan	370 satuan pendidikan	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	0
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	10 Peserta Didik	370 satuan pendidikan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	132,352,420
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	>179 Orang	370 satuan pendidikan	1,877,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	2,399,160,280

1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	560 Orang	370 satuan pendidikan	234,061,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	324,673,800
-----------------	--	-----------------------------------	--	---	--	--------------	-----------	-----------------------	-------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------	-------------

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan oaju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	SuPber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						PrograP	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi											
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	370 Satuan * Pendidikan	370 satuan pendidikan	42,230,740,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	42,230,740,000
<b>1 01 02 2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>								<b>22,928,947,875</b>					<b>20,123,806,620</b>
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	5 Ruang	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,455,189,000
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	5 Ruang	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	3,019,049,900
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	3 Ruang	58 satuan pendidikan	635,101,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	837,846,240
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	3 Ruang	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,745,980,320
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	5 Ruang	58 satuan pendidikan	2,760,446,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	2,791,651,080
1 01 02 2.02 07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	3 Ruang	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,008,000,000
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	21 paket	58 satuan pendidikan	205,458,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,779,058,400

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e10 Ruang	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,120,000,000
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e5 Ruang	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	616,000,000
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e4 Ruang	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	672,000,000
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e11 unit	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	739,200,000
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	1000 paket	58 satuan pendidikan	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	825,000,000
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	1120 Paket	58 satuan pendidikan	435,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,120,000,000
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e 5 paket	58 satuan pendidikan	687,980,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,120,605,500
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	58 Satuan Pendidikan	58 satuan pendidikan	50,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	0

1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua	90 persentas	10 Peserta Didik	58 satuan pendidikan	13,955,000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	35,000,000
-----------------	--	-----------------------------------	---	--	-----------------------------	--------------	------------------	----------------------	------------	-------------------------	--	-----------------------------------	---------------	------------

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Akademik dan Non Akademik		Kecamatan, Semua Kelurahan						Alokasi Umum			
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e32 Orang	58 satuan pendidikan	691,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	830,582,280
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e215 Orang	58 satuan pendidikan	229,096,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	408,643,900
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e50 Satuan Pendidikan	58 satuan pendidikan	17,192,880,000	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	0
<b>1 01 02 2.03</b>	<b>elolanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>								<b>8,870,981,000</b>					<b>10,266,850,340</b>
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e2 unit	279 lembaga	1,377,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	467,170,000
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		90 persentas	e18 Unit	279 lembaga	1,249,681,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	1,991,310,000
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e 3 paket	279 lembaga	4,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	286,032,500
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e 8 Paket	279 lembaga	4,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	200,100,000

1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan,	90 persentas	e 2 Paket	279 lembaga	550,241,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	0
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-------------	-------------	------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------	---

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Kelurahan									
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e4 Paket	279 lembaga	131,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	236,975,000
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e650 Peserta Didik	279 lembaga	120,012,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	457,490,000
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e90 Orang	279 lembaga	213,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	280,058,240
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e150 Satuan Pendidikan	279 lembaga	97,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	55,000,000
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e279 Satuan Pendidikan	279 lembaga	5,112,000,000	DAK Non Fisik-TPG PNSD		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	5,940,000,000
1 01 02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e279 Orang	279 lembaga	10,100,000			Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	92,714,600
<b>1 01 02 2.04</b>	<b>elolan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>								<b>7,795,136,500</b>					<b>7,337,616,150</b>
1 01 02 2.04 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e1 Unit	27 satuan pendidikan	2,888,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	0

1 01 02 2.04 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal /	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan,	90 persentas	e1 Unit	27 satuan pendidikan	3,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	0
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--------------	---------	----------------------	-----------	------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------	---

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan aaju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Iasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sudber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Prograd	Keluaran Sub Kegiatan	Iasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kesetaraan		yang Direhabilitasi Sedang/Berat		Semua Kelurahan									
1 01 02 2.04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e15 Paket	27 satuan pendidikan	178,867,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	249,200,000
1 01 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	e24 Paket	27 satuan pendidikan	249,696,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	249,200,000
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	3405 Peserta Didik	27 satuan pendidikan	208,249,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	383,260,570
1 01 02 2.04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	108 Orang	27 satuan pendidikan	220,573,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	28,248,000
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	27 Satuan Pendidikan	27 satuan pendidikan	51,501,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	74,135,000
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase pengelolaan pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persentas	27 Satuan Pendidikan	27 satuan pendidikan	6,880,300,000	DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD		Persentase pengelolaan pendidikan	90 persentase	6,050,880,000
<b>2</b>	<b>URUSANREMERINTAWANWAIIBYANG TIDAKBTRNITANDENGAN PELAYADAKNDASAR</b>													
<b>2 22</b>	<b>URUPANDEE/IERINTAHNNRIDANGNEYUNRYAAN</b>								<b>867,084,700</b>					<b>2,896,797,600</b>
<b>2 22 02</b>	<b>DROGRAE/IPENGER1BANGANNEYUNRYAAN</b>								<b>485,854,700</b>					<b>1,673,310,600</b>
<b>2 22 02 2.01</b>	<b>engelolaanKabdnyaag yaagMa^ arpkatUelaauyadalamDaerab KabupKenaKota</b>								<b>99,482,200</b>					<b>369,862,000</b>
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persentas	e 11 Objek	1 objek dan orang	94,232,200			Persentase pengembangan kebudayaan	67 persentase	80,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	PraSiraan Eaju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Iosasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu IndiSatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu IndiSatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				ToloS USur	Target	
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persentas	4 Orang	1 objek dan orang	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengembangan kebudayaan	67 persentase	289,862,000
<b>2 22 02 2.02</b>	<b>tarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>376,732,500</b>					<b>1,090,931,600</b>
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya Yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persentas	10 Objek	2 objek	320,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengembangan kebudayaan	67 persentase	544,500,000
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persentas	10 Laporan	2 objek	55,974,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengembangan kebudayaan	67 persentase	546,431,600
<b>2 22 02 2.03</b>	<b>binaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>9,640,000</b>					<b>212,517,000</b>
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah pembinaan lembaga, adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persentas	2 Orang	2 orang	4,990,000			Persentase pengembangan kebudayaan	67 persentase	201,452,000
2 22 02 2.03 03	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat</b>	Persentase pengembangan kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah pembinaan lembaga, adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persentas	1 Unit	2 orang	4,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengembangan kebudayaan	67 persentase	11,065,000
<b>2 22 03</b>	<b>RROGPAMPENGEMBANKANKESENIANTRODISIONAL</b>								<b>154,940,000</b>					<b>384,091,000</b>
<b>2 22 03 2.01</b>	<b>Pnml&gt; i naaeKaseningyEagMasyarpkatUnlaaunya dalamDaerahKabupaten/Kota</b>								<b>154,940,000</b>					<b>384,091,000</b>
2 22 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	persentase pengembangan kesenian tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		80 persentas	100 Orang	1 lembaga	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengembangan kesenian tradisional	80 persentase	150,000,000
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	persentase pengembangan kesenian tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persentas	3 Lembaga	1 lembaga	4,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase pengembangan kesenian tradisional	80 persentase	234,091,000
<b>2 22 04</b>	<b>RROGRAMPERISIN/AJRSEHARAH</b>								<b>4,990,000</b>					<b>134,186,000</b>
<b>2 22 04 2.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah LeSal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>4,990,000</b>					<b>134,186,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.10.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		CaKaiian Prograui	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi OutKut Kegiatan	Target CaKaiian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Suuber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Prograui	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan sejarah	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal provinsi yang Diberdayakan	Jumlah pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persentas	e1 Orang	1 orang	4,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pembinaan sejarah	60 persentase	134,186,000
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>								<b>216,610,000</b>					<b>489,510,000</b>
<b>2.22.05.2.01 Pene</b>	<b>tapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>								<b>205,535,000</b>					<b>372,460,000</b>
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Objek	1 Kegiatan	5,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan	100 %	58,000,000
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan	100 %	314,460,000
<b>2.22.05.2.02 Peng</b>	<b>elolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>								<b>11,075,000</b>					<b>117,050,000</b>
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persentas	e 2 Objek	3 objek	5,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	60 persentase	30,000,000
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persentas	e 3 objek	3 objek	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	60 persentase	87,050,000
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAMPEOGELNLPKNPERMUSEUMAN</b>								<b>4,690,000</b>					<b>215,700,000</b>
<b>2.22.06.2.01 Peng</b>	<b>engalolaun MuseamKabupaten/Kota</b>								<b>4,690,000</b>					<b>215,700,000</b>
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah pengelolaan museum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persentas	e2 Orang	1 orang	4,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan permuseuman	60 persentase	215,700,000
<b>TOTAL</b>									<b>493,914,053,192</b>					<b>119,075,897,579</b>

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dan Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada tabel dibawah ini :

**TABEL 4.2**  
**RENCANA TARGET KINERJA IKU KD/IKU OPD**

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,23	8,30	
		Harapan lama sekolah	13,76	13,35	
2.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	1,5	1,7	

**TABEL 4.3**  
**RENCANA TARGET KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2022**

NO.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target		KET.
		2022	2023	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1	Angka rata-rata lama sekolah	8,23	8,30	
2	Angka harapan lama sekolah	13,76	13,35	
3	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	287	295	
	Angka partisipasi kasar (APK)			
4	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	51,69	52,19	
5	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,92	109,80	
6	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87,54	89,17	
	Angka partisipasi murni (APM)			
7	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	99,46	99,63	

8	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83,11	84,54	
	Angka partisipasi sekolah (APS)			
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,30	99,39	
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	97,25	97,46	
	Angka Putus Sekolah :			
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,001	0,001	
12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,01	0,01	
	Angka kelulusan (AL) :			
13	Angka kelulusan (AL) SD/MI	100	100	
14	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	
	Angka melanjutkan (AM) :			
15	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	100	100	
	Fasilitas Pendidikan:			
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	1256	1506	
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	432	457	
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	88,95	88,95	
19	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	25,89	25,90	
20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	10,75	10,80	
21	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	8,75	8,77	
22	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,46	0,47	
23	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1,79	1,80	
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	43,75	44,25	
25	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	88,41	89,16	
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	46,12	46,22	
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,80	2,85	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal      Agustus 2022



**Indrawati, S. Pd, M. MPd**  
Nip. 19621117 198207 2 002



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
    - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
    - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
    - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
    - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisi Dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS</b>	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>43.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**